



## **EVALUASI PROGRAM PKK LKP MANDIRI MELALUI UJI KOMPETENSI TATA BUSANA PADA TUK ISMIA KARANGANYAR, JAWA TENGAH**

**Yosephine Flori Setiarini<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Akademi Kesejahteraan Sosial “AKK” Yogyakarta  
[florisetiarini@gmail.com](mailto:florisetiarini@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Evaluasi program ini bertujuan untuk mengetahui kualitas program pelatihan keterampilan Tata Busana yang diselenggarakan oleh LKP Mandiri dengan mengakses program PKK sesuai dengan Standar Kelulusan yang ditargetkan Pemerintah. Evaluasi program ini dilaksanakan melalui Uji Kompetensi Tata Busana yang diselenggarakan LSK Tata Busana pada TUK ISMIA Karanganyar, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah observasi, penilaian, dan dokumentasi. Evaluasi program PKK melalui Uji kompetensi Tata busana ini menggunakan Rubrik Penilaian yang diterbitkan oleh LSK Tata Busana edisi Revisi 8 September 2020. Peserta uji kompetensi sejumlah 60 orang dengan materi ujian praktik selama 5 jam. Unit kompetensi yang diujikan yaitu: (1) Mampu melakukan pekerjaan menjahit busana dengan alat jahit tangan dan mesin jahit mono fungsi sesuai standar menjahit, (2) Mampu mempresentasikan hasil busana yang telah dijahit sesuai dengan keinginan pelanggan dengan rapi melalui proses penyetricaan, pelipatan dan pengepakan, dan (3) Mampu melakukan pekerjaan menjahit busana dan pemeliharaan alat jahit dengan menerapkan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam lingkungan kerja. Hasil Uji Kompetensi terdapat 50 orang dinyatakan kompeten dan 10 orang dinyatakan tidak kompeten. Dengan demikian 83% peserta dinyatakan Kompeten dalam Uji Kompetensi sehingga target pelaksanaan program PKK minimal 70 % dari peserta program PKK kompeten dapat terwujud.

**Kata kunci:** Evaluasi Program, Program PKK, LKP, Uji kompetensi, TUK.

### **ABSTRACT**

*The evaluation of this program aims to determine the quality of the Dressmaking skills training program organized by LKP Mandiri by accessing the PKK program in accordance with the graduation standards targeted by the Government. The evaluation of this program is carried out through the Fashion Design Competency Test held by the LSK for Dressmaking at TUK ISMIA Karanganyar, Central Java. The methods used are observation, assessment, and documentation. The evaluation of the PKK program through the Dressmaking competency test uses the Assessment Rubric published by the Revised edition of the Fashion Design LSK on September 8 2020. The competency units tested are: (1) Able to carry out clothing sewing work with hand sewing tools and a mono function sewing machine according to sewing standards, (2) Able to present the results of clothes that have been sewn according to customer wishes neatly through the ironing, folding and packing processes, and (3) Able to perform clothing sewing and maintenance of sewing tools by applying the principles of occupational health and safety (K3) in the work environment. Results of the Competency Test, there were 50 people declared competent and 10 people declared incompetent. Thus 83% of participants were declared Competent in the Competency Test so that the PKK program implementation target of at least 70% of competent PKK program participants could be realized.*

**Keywords:** Program Evaluation, PKK Program, LKP, Competency Test, TUK.

### **PENDAHULUAN**

Dalam bidang Pendidikan, baik Pendidikan formal maupun non formal, evaluasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Sukardi (2008) mengemukakan bahwa evaluasi pada bidang Pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam tiga cakupan, yaitu: evaluasi Pembelajaran, evaluasi program, dan evaluasi system. Evaluasi ini dapat dilakukan terhadap peserta didik, Lembaga, dan program pendidikannya. Program merupakan suatu rangkaian kegiatan sebagai bentuk implementasi dari suatu kebijakan. Secara Umum, program diartikan sebagai “rencana” yang akan dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang atau suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya Suharsimi dan Abdul Jabar (2009) mengemukakan bahwa apabila program tersebut dikaitkan dengan evaluasi program, maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Salah satu Program layanan Pendidikan diupayakan pemerintah yaitu Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK). Program PKK ini adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan industri, diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu setingkat operator dan teknisi yang dibuktikan dengan sertifikat

kompetensi sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) dengan peluang kerja (*job opportunities*) yang ada (Juknis PKK 2020).

Program PKK ini merupakan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan yang mengakses program, kegiatan ini berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang yaitu peserta didik, Lembaga, dan program pendidikannya. Dimana Lembaga yang terlibat disini adalah LKP itu sendiri, Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) sesuai bidang, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Dengan demikian kegiatan ini merupakan evaluasi program yang bertujuan untuk peningkatan kualitas Pendidikan. Djemari Mardapi (2003) mengemukakan bahwa usaha peningkatan kualitas Pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian, dimana keduanya saling memiliki keterkaitan. Sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas belajar yang baik, selanjutnya system penilaian yang baik akan mendorong guru/instruktur untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar dengan lebih baik. Evaluasi dapat mendorong peserta didik untuk lebih giat belajar secara terus menerus, dan juga mendorong pendidik untuk lebih meningkatkan kualitas proses pembelajarannya serta mendorong lembaga untuk lebih meningkatkan fasilitas dan kualitas manajemennya (Wijiningsih, 2015).

Salah satu bentuk evaluasi program melalui sistem penilaian yang dimaksudkan dalam program PKK ini, peserta didik diukur kemampuan keterampilannya melalui Uji Kompetensi. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Buku Petunjuk Teknis Program PKK Tahun 2020 yaitu bahwa Tujuan Program PKK adalah: (1) Mendidik dan melatih peserta didik dengan keterampilan vokasi yang selaras dengan kebutuhan Dunia Kerja, (2) Memastikan peserta didik PKK mengikuti uji kompetensi, dan (3) Peserta terserap di Dunia Kerja.

Program PKK ini merupakan salah satu wujud program penyelarasan kursus dan pelatihan dengan kebutuhan kompetensi kerja pada DUDI dan kewirausahaan sehingga melalui program ini, peserta didik dibekali keterampilan sesuai kebutuhan DUDI dan dikembangkan etos kerjanya. Setelah menyelesaikan program, peserta didik dibantu dan dibimbing oleh lembaga penyelenggara program untuk mengakses lapangan kerja yang tersedia sampai dapat bekerja pada DUDI (Anddy Abdullah, 2019: 42).

Bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan Program PKK (Juknis PKK, 2020) ini dapat diakses oleh (1) Satuan Pendidikan Nonformal, (2) Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, Akademi Komunitas dan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi), dan (3) UPT Ditjen Pendidikan Vokasi, (4) Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI), serta (5) Lembaga Diklat milik Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang memiliki izin yang sah (Buku Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) (Kemendikbud, 2020).

Pemerintah dalam hal ini memberi kesempatan pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai Satuan Pendidikan Nonformal, untuk mengakses bantuan guna penyelenggaraan program PKK sejauh kriteria dan persyaratan dimaksud dapat dipenuhi. Disamping persyaratan administratif kelembagaan, dalam Juknis PKK (Kemendikbud, 2020) disebutkan bahwa peserta didik yang direkrut atau penerima bantuan PKK ini adalah warga masyarakat usia 15 s.d 30 tahun dengan prioritas usia 15 s.d 25 tahun dengan kriteria: (1) Anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) atau lulus tidak melanjutkan atau, (2) Warga belajar paket C vokasi atau, (3) Warga masyarakat menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Calon peserta wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak sedang mengikuti program sejenis yang dibiayai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Jenis keterampilan yang diprioritas merujuk pada empat sektor yang menjadi fokus revitalisasi pendidikan vokasi yaitu; (1) *Machinery and Construction*, (2) *Creative Economy*, (3) *Hospitality*, dan (4) *Care Service*. Disamping itu kurikulum, proses pembelajaran, instruktur dan sarana dan prasarana pembelajaran ditetapkan dalam penyelenggaraan program PKK ini. Demikian juga system evaluasi hasil pembelajaran dari penyelenggaraan program PKK ini.

Evaluasi hasil pembelajaran berbentuk uji kompetensi yang diselenggarakan oleh: (1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) atau (2) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau (3) Dunia usaha dan industri yang direkomendasikan oleh asosiasi. Masing-masing Lembaga penguji memiliki Standar Penilaian berbeda. Untuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) menggunakan Panduan Penilaian dengan Rubrik Penilaian Edisi Revisi 8 September 2020 beserta Tabel Skoring dan Rekapitulasi yang telah distandarkan.

Setelah mengikuti proses pembelajaran dalam kurun waktu yang diprogramkan yaitu selama 200 jam pelajaran, peserta didik wajib mengikuti uji kompetensi. Hal ini sesuai dengan

Juknis Program PKK yang diselenggarakan melalui tahapan: (1) Sosialisasi, (2) Penerimaan Proposal, (3) Penetapan Calon Penerima, (4) Pencairan Anggaran, (5) Proses Pembelajaran, (6) Uji Kompetensi, dan (7) Monitoring dan evaluasi.

Keberhasilan program PKK disamping peserta didik harus mengikuti pembelajaran dengan tuntas, peserta juga harus mengikuti uji kompetensi. Hal ini seperti yang dipaparkan pada Petunjuk Teknis penyelenggaraan program PKK (Kemendikbud, 2020) yaitu bahwa indikator keberhasilan Program PKK adalah: (1) Peserta didik mengikuti pembelajaran dengan tuntas dan mengikuti uji kompetensi, (2) 70% peserta didik memperoleh sertifikat dan/atau hasil kelulusan ujian kompetensi, (3) Minimal 55.10% lulusan dalam 1 tahun setelah selesai uji kompetensi bekerja di dunia usaha/industry, dan (4) Adanya laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan Program PKK berikut penggunaan dana bantuan PKK yang tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, bermutu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Berdasarkan Juknis di atas, bahwa untuk mengukur kemampuan atau kompetensi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran khususnya program PKK salah satunya dilakukan dengan Uji kompetensi. Hal ini sesuai dengan tujuan dilaksanakannya Uji Kompetensi yaitu bahwa Uji kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis, untuk menentukan kompetensi seseorang pada kualifikasi atau unit kompetensi tertentu. Disamping itu uji kompetensi merupakan indikator keberhasilan peserta didik khususnya LKP dalam mengikuti suatu program pembelajaran. Hal ini ditambahkan bahwa penilaian hasil belajar bertujuan untuk (1) mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, (2) menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, (3) menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan (4) memperbaiki proses pembelajaran (<http://smamda.net/penilaian-hasil-belajar/September 19, 2017>).

Selanjutnya guna penyelenggaraan uji kompetensi pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). LSK adalah lembaga yang diberi kewenangan dari pemerintah untuk mengelola dan menyelenggarakan Uji kompetensi. LSK adalah lembaga sertifikasi yang menyelenggarakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus serta masyarakat yang belajar mandiri. Bentuk organisasi LSK adalah lembaga mandiri yang berbadan hukum yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui pemerintah. LSK dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab kepada pemerintah, Organisasi Profesi

pembentuknya, dan masyarakat (peserta uji kompetensi). LSK berkedudukan di ibukota Negara RI dan hanya terdapat satu LSK untuk satu bidang keahlian. Untuk bidang tata busana, pengelolaan dan penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi diserahkan pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Busana (LSK-TB). Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan LSK adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan.

LSK memiliki kewenangan sebagai berikut: (1) menetapkan tempat uji kompetensi, (2) menetapkan master penguji dan penguji uji kompetensi, (3) menugaskan master penguji dan penguji uji kompetensi, (4) menetapkan materi uji kompetensi, (5) menetapkan alat uji kompetensi, (6) menetapkan biaya uji kompetensi berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah, (7) menetapkan kelulusan peserta uji kompetensi, (8) menetapkan jadwal uji kompetensi, (9) menetapkan dan mendistribusikan sertifikat kompetensi dengan blanko sertifikat yang disediakan Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, (10) mengevaluasi tempat uji kompetensi minimal dua kali dalam satu tahun. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Tata Busana sesuai dengan kewenangannya memberi tugas kepada penulis selaku Tim Instruktur/Penguji Profesional bidang Tata Busana untuk melakukan pengujian atau pengukuran kompetensi peserta didik LKP pada Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Pada LSK-TB pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta LKP berdasarkan standar kompetensi bidang Tata Busana level 2 ini dimaksudkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik tersebut dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai asisten pembuat busana. Untuk mengetahui kompetensi peserta didik sebagai bentuk evaluasi hasil pembelajaran melalui program PKK ini dilakukan dengan Penilaian. **Penilaian** adalah proses memberikan atau menentukan terhadap hasil belajar tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Selanjutnya Sudrajat, A. (2008) mengemukakan bahwa penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka). Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. **Tes** atau Uji adalah cara penilaian yang dirancang dan

dilaksanakan kepada peserta didik pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas. Selanjutnya **tujuan penilaian dalam pembelajaran** diantaranya untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Penilaian diperlukan untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah **menguasai kompetensi**. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis (Sudrajat, A.,2008)

Evaluasi program PKK melalui Uji kompetensi Tata busana ini menggunakan Rubrik Penilaian yang diterbitkan oleh LSK Tata Busana edisi Revisi 8 September 2020. Materi uji kompetensi bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta didik dalam hal sebagai berikut: (1) Kemampuan melakukan pekerjaan menjahit busana dengan alat jahit tangan dan mesin jahit mono fungsi sesuai standar menjahit, (2) Kemampuan mempresentasikan hasil busana yang telah dijahit sesuai dengan keinginan pelanggan dengan rapi melalui proses penyetricaan, pelipatan dan pengepakan, dan (3) Kemampuan melakukan pekerjaan menjahit busana dan pemeliharaan alat jahit dengan menerapkan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam lingkungan kerja.

Standar kelulusan uji praktik, “Kompeten” dan “Tidak Kompeten”. Selanjutnya Standar keberhasilan program PKK dilaksanakan oleh LKP adalah minimal 70 % dari peserta program PKK memperoleh Sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian yaitu Tata Busana sebagai asisten pembuat busana (level2).

Dalam pelaksanaan program PKK tahap ini, LKP Mandiri bekerjasama dengan PT. Cartini Lingerie Indonesia, Randusari, Teras Boyolali yang merekrut tenaga kerja sejumlah 60 orang untuk mengikuti pelatihan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai jenjang pada bidang keahliannya. Jenjang kompetensi menjahit pakaian/tata busana yang diujikan yaitu level 2, yaitu sebagai asisten pembuat pakaian.

Evaluasi Program PKK yang diakses oleh LKP Mandiri melalui Uji Kompetensi Tata Busana ini sangatlah penting karena untuk mengukur sejauhmana program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) yang dilaksanakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) MANDIRI yang beralamat di Jalan Solo-Semarang km.08 Teras, Boyolali, Jawa Tengah ini sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan

yaitu dalam Juknis Program PKK disebutkan bahwa minimal 70% dari jumlah peserta didik yang direkrut melalui program ini memperoleh sertifikat uji kompetensi (kompeten).

Evaluasi Program ini dilaksanakan oleh Penulis selain sebagai pelaksanaan tugas sebagai penguji profesional dari LSK Tata Busana juga untuk mengevaluasi hasil pembelajaran keterampilan Tata busana khususnya level 2 pada LKP Mandiri, Boyolali sesuai dengan indikator keberhasilan program PKK yang digariskan Pemerintah.

### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Evaluasi Program PKK melalui uji kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi peserta didik dalam bidang menjahit/tata busana pada level 2 sebagai asisten pembuat busana. Evaluasi program ini dimaksudkan bahwa setelah mengikuti program/pembelajaran kemudian mengikuti uji kompetensi, peserta didik tersebut dinyatakan mampu atau kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai asisten pembuat busana. Tercapainya kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk evaluasi program berupa penilaian uji kompetensi ini dilaksanakan dengan melalui tahap observasi, tahap penilaian dan tahap dokumentasi. Tahap Observasi dilakukan sebelum dan saat pelaksanaan uji kompetensi. Tahap Penilaian dilakukan dengan menggunakan bahan dan alat ukur penilaian yaitu form skoring dan Rubrik Penilaian dari LSK Tata Busana. Dokumentasi kegiatan dilakukan pada saat dan sesudah penilaian.

Evaluasi program PKK melalui Uji Kompetensi Tata Busana dari lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) MANDIRI, Boyolali. Level 2 ini dilaksanakan di TUK ISMIA Karanganyar, Jawa Tengah dan diikuti peserta sejumlah 60 orang. Uji kompetensi ini dilaksanakan dalam 2 hari/tahap yaitu sabtu, 3 Oktober dan minggu, 4 Oktober 2020. Hal ini mengingat ketentuan LSK-TB. Masing-masing tahap dilakukan pengujian praktik selama 5 jam.

Bahan evaluasi uji kompetensi hasil tes praktik level 2 berupa pekerjaan peserta uji untuk mengukur kemampuan peserta dalam mengerjakan pembuatan busana.

Selanjutnya alat yang digunakan untuk melakukan penilaian berupa Instrumen penilaian berupa form skoring beserta Rubrik Penilaian yang berisi kriteria yang telah disepakati dan ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Busana (LSK-TB). Instrumen penilaian Uji kompetensi Tata Busana berupa instrumen penilaian atau formulir skoring materi uji kompetensi praktik ditunjukkan dalam tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Instrumen Penilaian Praktik Uji Kompetensi Tata Busana level 2**

<b>Elemen Kompetensi</b>	<b>Komponen Penilaian</b>	<b>Bobot</b>
3.1. Mampu melaksanakan pekerjaan menjahit busana dengan alat jahit tangan	3.1.1.1. Kelim dibuat dengan kriteria:	<b>6</b>
	3.1.1.2. Kancing dipasang dengan benar, meliputi :	<b>6</b>
3.2. Mampu melaksanakan pekerjaan menjahit bagian-bagian potongan pakaian dengan mesin jahit sesuai tehnik penyelesaian busana	3.2.1.1. Potongan blus / rok / rok celana / pakaian anak / daster dijahit dengan mesin jahit sesuai dengan tertib kerja	<b>12</b>
	3.2.1.2. Garis hias (prinses, empire, opnaisel, yoke) dijahit dengan kriteria :	<b>10</b>
	3.2.1.3. Pelengkap busana (Saku tempel, tali pengikat, manset, bisban, dll) dibuat berdasarkan :	<b>8</b>
	3.2.1.4. Garis leher diselesaikan dengan kriteria :	<b>15</b>
	3.2.1.5. Ban pinggang diselesaikan dengan cara :	
	3.2.1.6. Kerah dijahit dengan :	<b>12</b>
	3.2.1.7. Lapisan kerung lengan dijahit sesuai :	
	3.2.1.8. Lengan dijahit dengan teknik penyelesaian :	
	3.2.1.9. Saku dalam, saku tempel untuk rok / rok celana dijahit sesuai desain dengan cara :	<b>8</b>
	3.2.1.10. Belahan Lubang kancing atau Resleting / tutup tarik dijahit :	
5.1. Mampu menyetrika hasil busana yang telah dijahit sesuai dengan jenis dan sifat bahannya	5.1.1.1. Busana disetrika dengan suhu yang sesuai dengan jenis bahan dan tidak kusut	<b>6</b>
5.2. Mampu mempresentasikan hasil busana yang telah dijahit (tidak ada penilaian presentasi)	Tidak ada penilaian presentasi	<b>0</b>
5.3. Mampu melakukan pelipatan hasil busana yang telah dijahit	5.3.1.1. Busana dilipat dengan simetris, sesuai model dan kemasannya	<b>3</b>
5.4. Mampu melakukan pengepakan hasil busana yang telah dijahit	5.4.1.1. Busana dipacking sesuai kemasannya	<b>3</b>
6.1. Mampu menerapkan prosedur kesehatan keselamatan kerja (K3) dalam lingkungan kerja	6.1.1.1. Perlindungan diri dalam bekerja digunakan dengan lengkap	<b>3</b>
	6.1.1.2. Kebersihan diri dijaga dengan bersih, serta berpakaian dengan sopan	<b>4</b>
	6.1.1.3. Area kerja dijaga dan dibersihkan	<b>4</b>
Total bobot		<b>100</b>

Kriteria Skor uji kompetensi Tata Busana level 2 jabatan asisten pembuat busana bentuk praktik untuk masing-masing item dengan nilai 2, 1, dan 0. Berdasarkan Instrumen Penilaian Praktik pada tabel di atas, panduan penilaian lebih terinci masih dijabarkan dalam Rubrik Penilaian Uji Kompetensi Tata Busana level 2 KKNi edisi Revisi 8 September 2020. Selanjutnya Kriteria kelulusan Uji kompetensi praktik Tata Busana tersebut dikelompokkan dengan predikat dan digambarkan pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Kriteria Penilaian Uji Kompetensi Praktik Tata Busana Level 2**

Predikat	Keterangan
<b>Kompeten</b>	bila Total skor perolehan mencapai 80
<b>Tidak Kompeten</b>	bila Total skor perolehan dibawah 80

Tahap dokumentasi dilaksanakan dengan mendokumentasikan seluruh berkas penilaian baik teori maupun praktik, untuk dilaporkan ke LSK-TB untuk direkomendasikan bahwa peserta layak diberi sertifikat Kelulusan Uji Kompetensi Tata Busana level 2 yaitu sebagai Asisten Pembuat busana

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa evaluasi program PKK LKP Mandiri, Boyolali melalui uji kompetensi peserta didiknya sebagai asisten pembuat busana yang dilaksanakan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) ISMIA, Karanganyar, Jawa Tengah. LKP Mandiri sebagai lembaga kursus dan pelatihan bidang Tata Busana yang beralamat di Jl. Solo- Semarang Km 8, Boyolali, Jawa Tengah juga meraih kesempatan dengan berkompetisi mengakses dana untuk penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) ini. Mengingat jumlah peserta 60 orang, maka evaluasi program dengan uji kompetensi dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu Sabtu, 3 Oktober 2020 dan Minggu, 4 Oktober 2020 dengan masing-masing 30 peserta. Jenis Ujian ini adalah uji praktik dilaksanakan selama 5 jam (300 menit).

Penulis sekaligus sebagai Tim penguji profesional Uji kompetensi Tata busana level 2 LSK-TB mendapat Tugas dari LSK-TB untuk melaksanakan pengujian pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) ISMIA, Karanganyar, Perum. Permata Hijau, Bluluk, Karanganyar,

Jawa Tengah telah diverifikasi layak atau memenuhi persyaratan sebagai TUK oleh LSK Tata Busana yang berpusat di Jakarta.

Mekanisme pelaksanaan uji kompetensi dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: (1) Penyerahan berkas uji kompetensi (masih disegel) yang dikirim oleh LSK Tata Busana ke TUK Tata Busana ISMIA kepada Tim Penguji Tata Busana yang disaksikan oleh Pengawas dari Dinas Pendidikan kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, (2) Tim Penguji Tata Busana membuka segel berkas Uji kompetensi Tata Busana disaksikan Pimpinan TUK ISMIA, Pengawas dari Dinas Pendidikan kabupaten Karanganyar, dan peserta uji, (3) Penguji membacakan Tata Tertib Uji Kompetensi Tata Busana yang dibuat oleh LSK, (4) Mengisi Berita Acara Uji Kompetensi Tata Busana, Presensi Uji kompetensi peserta dan penguji., (5) Membagi soal Uji kompetensi praktik dan bahan uji praktik sambil peserta uji melakukan persiapan alat dan mesin jahit, (6) penguji menjelaskan dan peserta uji memeriksa potongan atau komponen bagian busana yang akan dijahit, (7) peserta uji mengerjakan praktik selama 5 jam (300 menit), dan Peserta menyerahkan hasil ujian praktiknya kepada penguji untuk diperiksa dan dinilai.



**Gambar 1. Kesiapan Peserta Didik LKP Mandiri, Boyolali dalam mengikuti Uji Kompetensi Tata Busana**



**Gambar 2. Pelaksanaan Uji kompetensi Tata Busana sebagai Bentuk Evaluasi Program**

Berdasarkan Data Hasil Penilaian Uji kompetensi praktik pada pengujian tahap 1 maupun tahap 2 sejumlah 60 orang yang dinyatakan kompeten dengan hasil memenuhi kriteria lulus uji kompetensi sesuai dengan ketentuan LSK-TB yaitu diatas 80 diperoleh 50 peserta sedang tidak kompeten sejumlah 10 peserta. Menurut Juknis PKK dikatakan bahwa Indikator Program PKK dinilai berhasil apabila minimal 70 % peserta didik memperoleh sertifikat Uji kompetensi. Berdasarkan data yang ada 50 peserta dinyatakan kompeten, sehingga 83,3% peserta didik program PKK LKP Mandiri dinyatakan dapat memperoleh sertifikat kompetensi Tata Busana Level 2. Dengan demikian Program PKK LKP Mandiri dinyatakan berhasil.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) bahwa Evaluasi program PKK LKP Mandiri melalui Uji kompetensi Tata Busana level 2 pada TUK ISMIA, Karanganyar, Jawa Tengah dapat dilaksanakan dengan baik, serta mengikuti tata cara dan tahapan yang telah ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Busana, (2) bahwa Program PKK yang dilaksanakan LKP Mandiri, Boyolali melalui uji kompetensi Tata Busana level 2 pada TUK ISMIA, Karanganyar, Jawa Tengah memperoleh hasil yang baik, terbukti 83% peserta uji dinyatakan kompeten dan berhak memperoleh sertifikat kompetensi Tata Busana Level 2. Dengan demikian Program PKK yang diselenggarakan oleh LKP Mandiri dinyatakan berhasil.

### **REKOMENDASI**

Saran bagi LKP Mandiri, Boyolali hendaknya peserta disiapkan dengan latihan uji praktik dengan baik, terutama dalam hal tahapan dan teknik pengerjaan penggabungan bagian-bagian busana dan penyelesaian busananya agak lebih cepat dan tepat dalam ujian praktiknya. Saran bagi Peserta Uji, hendaknya peserta membekali diri dengan keterampilan teknologi busana dan banyak berlatih agar lebih siap dalam mengikuti uji kompetensi serta lebih efisien dan efektif dalam pengerjaan materi uji praktik.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada: 1) Pimpinan Akademi Kesejahteraan Sosial “AKK” Yogyakarta beserta Ketua LP3M yang memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat, 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Busana (LSK-TB) yang menugaskan penulis sebagai Penguji profesional untuk melakukan pengujian, 3) Pimpinan beserta staff Tempat Uji Kompetensi (TUK) ISMIA, Karanganyar, Jawa Tengah yang telah menyediakan tempat dan fasilitas untuk pelaksanaan evaluasi program LKP Mandiri melalui Uji kompetensi Tata Busana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anddy Abdullah. (2019). Upaya Pengelola LKP Andi Jaya dalam Meningkatkan Lulusan melalui Program Kecakapan Kerja. *Jurnal Comm-Edu*. ISSN : 2615-1480 p-ISSN : 2622-5492 Volume 2 Nomor 1, Januari 2019.
- Djemari Mardapi (2003). Desain dan Penilaian Pembelajaran Mahasiswa. Makalah disajikan dalam Lokakarya Sistem Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran, tanggal 19 Juni 2003 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Kemendikbud. (2020). Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2020 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI NOMOR 01 TAHUN 2020
- LSK Tata Busana. (2020). Rubrik dan Penilaian Uji kompetensi Tata Busana Level 2, Jakarta: LSK-TB.
- LSK Tata Busana. (2020). Skoring Penilaian Uji kompetensi Tata Busana, Jakarta: LSK-TB.
- Sudrajat, A. (2008). Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik dan Model Pembelajaran. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Suharsimi dan Abdul Jabar. (2009). Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi mahasiswa dan praktisi Pendidikan, Edisi kedua, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sukardi. (2008). Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijiningih. (2015). Peningkatan Kualitas Perkuliahan Teknik Draping Berbantuan Video melalui Evaluasi Program, Prosiding Seminar Nasional “Pengembangan SDM Kreatif dan Inovatif untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia Berdaya Saing Global”

*Flori, Evaluasi Program PKK LKP Mandiri melalui Uji Kompetensi Tata Busana pada TUK ISMIA, Karanganyar, Jawa Tengah.*

Pendidikan Teknik Boga dan Busana Volume 10 tahun 2015, Jurusan PTBB FT UNY,  
25 Oktober 2015.

<http://smamda.net/penilaian-hasil-belajar> diakses 19 September 2017.

<http://repositori.kemdikbud.go.id/646/1/0601140533PENGUJI.pdf>